

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

Arief Rachman^(ib1) dan Restiatun Restiatun^(ib2)

^{1,2,3}Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Tanjungpura
^{1,2,3}Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi No.1, Pontianak, Kalimantan Barat, 78124
E-mail: arief939@gmail.com¹⁾, restiatun@untan.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan tolok ukur tingkat kemandirian suatu daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Objek Penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 10 tahun (2013 - 2022). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Setelah dilakukan beberapa uji, maka ditentukan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah *Model Random Effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di Kalimantan Barat, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap PAD di Kalimantan Barat dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap PAD di Kalimantan Barat. Berdasarkan Nilai Koefisien Determinasi (R^2) diketahui bahwa 92,67% variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel jumlah penduduk, jumlah sepeda motor, dan tingkat pengangguran terbuka, *ceteris paribus*. Adapun berdasarkan nilai F-Statistik diketahui bahwa seluruh variabel bebas merupakan regressor yang baik bagi variabel Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Jumlah kendaraan, pengangguran terbuka, PAD, Kalimantan Barat

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah, dan pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Jadi, agar Pemerintah Daerah terus melakukan pembangunan kegiatan, mereka harus dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah dari pajak daerah, dimana pajak daerah ini menjadi dasar penyusunan rencana penerimaan (Hatta & Riduan, 2017). Banyaknya kebutuhan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah yang meharuskan daerah untuk menaikkan kualitas otonomi daerahnya agar mandiri dalam keuangan daerah (Mawarni, 2013).

PAD merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab (Syahrial & Sotuyo, 2014). PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensipotensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan.

Salah satu persoalan yang umumnya dihadapi pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah kekurangan dana dari daerah, yang menghambat proses otonomi daerah berjalan sebagaimana mestinya. Otonomi daerah akan berdampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi yang dimiliki. PAD Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013 – 2022. Realisasi PAD tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat tercapai pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp2.883.228.824.088 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Jumlah Penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan perekonomian suatu negara (Asmuruf et al., 2015). Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan perluasan usaha dan pendirian usaha-usaha baru. Hal ini pada tahap berikutnya akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Dengan kata lain, adanya pertumbuhan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah



(Sukirno, 2003). Tetapi penelitian Oktiani (2021) di Provinsi Sumatera Selatan serta penelitian Harahap (2018) di Sumatera Utara serta penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2022) di Yogyakarta yang menemukan tidak terdapat hubungan antara jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini tentu akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 – 2022 dengan rata-rata pertambahan penduduk sebesar 5.043.865 jiwa, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 5.513.390 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak (UU No. 28 tahun 2009). Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu objek pajak provinsi yang paling berpeluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang diterima provinsi dan menjadi salah satu komponen Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial Samudra et al. (2020), tetapi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pendaftaran ulang kendaraan oleh pemiliknya tidak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Tania, 2022). Semakin besar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan suatu daerah akan meningkatkan bagi hasil yang diterima suatu daerah. Karena PKB merupakan pajak provinsi maka bagi pemerintah kabupaten/kota PKB ini hanya merupakan sumber pendapatan asli daerah melalui skema Bagi hasil pajak, di mana semakin banyak sumbangan pajak pemerintah daerah kabupaten/kota pada pemerintah provinsi maka akan semakin besar juga penerimaan bagi hasil pajak pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah provinsi.

Berdasarkan data dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (2022) terdapat 2.617.562 unit kendaraan bermotor yang terdiri atas kendaraan roda 2 sebesar 2.363.898 unit dan kendaraan roda 4 sebesar 253.664 unit jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya 2021 yaitu 2.615.230 unit yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebesar 2.421.558 unit dan kendaraan roda 4 sebesar 193.672 unit. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor maka akan meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi

kendaraan bermotor yang berikutnya akan berdampak pada peningkatan PAD.

Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Barat jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan yang memadai maka mendorong terjadinya kesenjangan antara angkatan kerja dengan penduduk bekerja atau terjadi pengangguran. Ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka akan menurunkan kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi. Hal ini akan berdampak pada penurunan PAD. Daya beli masyarakat yang meningkat, salah satunya yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat membeli kendaraan bermotor, tentu akan meningkatkan potensi penerimaan asli daerah kabupaten kota melalui penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Peningkatan daya beli atas sepeda motor tersebut tentu saja akan diikuti dengan peningkatan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) PKB.

Dari latar belakang yang disampaikan tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang Pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. RUANG LINGKUP

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Widjaja, 1992). Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih. Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber Keuangan sendiri berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Sumber penerimaan daerah yang penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi sebagian besar pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin (2005). Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, jika semakin tinggi nilai PAD suatu daerah, semakin mampu daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi (Susanto & Sugianto, 2019).

Warsito (2001) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Contoh Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri, dan penerimaan daerah lainnya yang sah (Chandra, 2016). Daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak yang beragam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, seperti terlihat pada tabel yang ingin dijelaskan.

Sutrisno (2017) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah yaitu faktor Eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana infrastruktur, insentif, penerimaan subsidi, pembangunan penerimaan, sumber daya manusia, belanja daerah, daerah regulasi, sistem dan pelaporan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, penduduk termasuk salah satunya. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan jumlah penduduk, namun, hubungan antara keduanya tergantung pada jumlah penduduk suatu negara atau wilayah. Pendapatan daerah bisa diperoleh dari kegiatan ekonomi penduduk dalam bentuk pajak, retribusi, dan sebagainya pada (Murib et al., 2018). Peningkatan populasi berdampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan produksi. Besaran pendapatan daerah bisa dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk bertambah maka pendapatan yang ditarik akan meningkat (Halim, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Penduduk Kalbar dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan teori dan fenomena di atas, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa, karena semakin meningkat kegiatan ekonomi suatu daerah kemudian aliran pemerintahan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. Tetapi belum banyak penelitian empiris yang melihat pengaruh tingkat pengangguran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan kedua variabel tersebut melihat hubungannya secara berkebalikan yakni pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran

terbuka (Adhi Prasetyo & Aida, 2017; Pangastuti, 2015; Rizal et al., 2021).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik dengan roda dua atau roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke dalam penerimaan pajak daerah provinsi dan hasil dari pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling sedikit 10 % dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah provinsi harus dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Rasio pengangguran terhadap total tenaga kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Penduduk usia kerja (usia di atas 15 tahun) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi menganggur sementara termasuk dalam angkatan kerja (Sutrisno, 2017):

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru.
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan.

3. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data dalam penelitian ini berbentuk angka atau numerik dengan variabel independen Jumlah penduduk (JP), Jumlah kendaraan bermotor (JKB), Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependennya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berbentuk data panel, yakni gabungan antara data *time series* dan *cross section* yang mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama 10 tahun dari tahun 2013 hingga 2022 merupakan jenis data yang digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model regresi data panel yang ditujukan untuk mengestimasi apakah variabel independen/bebas memiliki pengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Sebelum dilakukan estimasi dengan model panel terbaik, dilakukan terlebih dahulu uji yang akan menentukan model terbaik dari ketiga model data panel (*Common Effect, Fixed Effect*



atau *Random Effect Model*) yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa studi empiris terdahulu yang telah disajikan, maka dalam penelitian ini dibangun persamaan estimasi (1) yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan (1) merupakan persamaan matematis yang diuji dalam penelitian ini.

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 JKB_{it} + \beta_3 TPT_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan (1):

PAD = Pendapatan Asli Daerah

JP = Jumlah Penduduk

JKB = Jumlah kendaraan bermotor

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

α = konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Series Tahun 2013-2022

e = error term / galat

Adapun variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi
PAD	Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2013 – 2022 dalam satuan Rupiah.
Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2013 - 2022. Satuan jiwa
Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih yang terdapat di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2013 - 2022. Satuan unit
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2013 - 2022. Satuan persen.

4. PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan hasil uji untuk ketiga jenis model panel data untuk menentukan model estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Keunggulan Model Regresi

	Prob.	Keputusan
Uji Chow	0,000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,1099	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	0,000	<i>Random Effect Model</i>

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai probabilitas pada Uji Chow sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 yang berarti berarti *Fixed Effect Model* yang diterima lebih baik dari pada *Common Effect Model*. Selanjutnya Uji Hausman memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1099 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*. Selanjutnya uji Lagrange Multiplier memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti *Random Effect Model* yang diterima lebih baik dari *Common Effect Model*. Berdasarkan hasil dari uji tersebut diperoleh bahwa *Random Effect Model* yang direkomendasikan dalam penelitian ini. Adapun hasil estimasi dengan Model *Random Effect* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda dengan *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Konstanta	12,37631	4,921243	0,0143
LNJP	0,840486	4,804891	0,0000
LNJKB	0,084314	3,551793	0,0005
TPT	0,151524	0,883589	0,3785
R-squared		0,926741	
F Statistic		0,0000	

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 adalah sebesar 0,926741 yang berarti bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan TPT dapat menjelaskan variabel terikat yaitu PAD sebesar 92 persen dan 8 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

2. Uji Statistik simultan (uji F)

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji f statistik sebesar 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil daripada taraf signifikansi alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan TPT secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kalimantan Barat.

3. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Berdasarkan data hasil uji signifikansi parsial yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan jumlah penduduk memiliki nilai t statistik sebesar 4,804891 dan nilai ini lebih besar dari 1,656 sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD di

Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Harahap, 2018) dan (Oktiani, 2021).

Berdasarkan hasil uji t-statistik diperoleh bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki nilai t statistik sebesar 3,551793 dan nilai ini lebih besar dari 1,656. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya jumlah kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil uji t-statistik diketahui bahwa TPT memiliki nilai t statistik sebesar 0,883589 dan nilai ini lebih kecil dari 1,656 sehingga menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya TPT secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kalimantan Barat.

4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PAD di Kalimantan Barat. Peningkatan populasi akan memicu tuntutan terhadap Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan populasi yang lebih besar, permintaan terhadap barang-barang konsumsi akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong ekonomi skala dalam produksi dan secara langsung mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Contoh konkret adalah pajak restoran. Seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota, kemungkinan akan ada lebih banyak restoran dan tempat makan yang dibuka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin besar. Hal ini berarti potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak juga akan semakin bertambah.

Informasi mengenai pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan jumlah penduduk di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Pontianak, sebagai kota terbesar dan ibu kota provinsi, tercatat nilai tertinggi dalam semua kategori pajak. Pajak hotel dan restoran di Pontianak mencapai Rp17.335.240.885 pajak restoran mencapai Rp51.460.293.816 dan pajak hiburan mencapai Rp8.525.539.753. Jumlah penduduk di Pontianak juga tercatat sebagai yang jumlah tertinggi, yaitu 663.713 jiwa Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan administrasi, banyak hotel, restoran, dan tempat hiburan beroperasi di sini, yang berkontribusi pada pendapatan pajak daerah yang tinggi.

Peningkatan penerimaan pajak dari lapangan usaha restoran, hotel, dan hiburan memang dapat memiliki dampak positif bagi kemandirian keuangan daerah, seperti yang telah dijelaskan dalam konteks Kota Pontianak dan daerah-daerah lainnya. Dengan pendapatan pajak yang cukup besar dari sektor-sektor ini, pemerintah daerah dapat memiliki sumber dana yang lebih besar untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan pembangunan daerah.

Di satu sisi, Kota Pontianak memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor-sektor ini, yang akan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pusat. Hal ini tentu saja akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk serta memajukan infrastruktur dan fasilitas publik.

Namun, di daerah lainnya, seperti yang di Kabupaten Kayong Utara dan Kapuas Hulu, terdapat tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut. Nilai yang rendah dalam pajak hotel, hiburan, dan restoran mungkin mengindikasikan tingkat aktivitas ekonomi dan perniagaan yang lebih rendah di daerah-daerah tersebut atau belum berkembang seperti daerah lainnya. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, kurangnya destinasi wisata, atau masalah lain yang dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan promosi pariwisata, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah, dan mengambil tindakan lain yang dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat mengoptimalkan potensi pendapatan pajak mereka, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Asmuruf et al. (2015) diperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doni (2018) diperoleh hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jakarta.

4.2 Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Barat selama ini cenderung meningkat, Jumlah kendaraan bermotor yang banyak di suatu daerah juga berarti ada kebutuhan yang tinggi akan tempat parkir. Pemerintah daerah biasanya menetapkan retribusi parkir untuk kendaraan bermotor yang berlaku di area-area tertentu. Dengan banyaknya motor, retribusi parkir dari pemilik motor yang harus membayar untuk mengakses dan menggunakan tempat parkir ini akan menyumbang pada PAD daerah kab/kota.

Kota Pontianak memiliki jumlah retribusi pelayanan parkir tertinggi dengan total Rp 1.172.436.737 Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak merupakan pusat aktivitas ekonomi dan administrasi yang menarik sejumlah besar



lalu lintas setiap hari. Hal ini berarti lebih banyak orang menggunakan fasilitas parkir, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah retribusi yang diterima. Selain itu, infrastruktur parkir yang baik dan sistem penagihan yang efisien juga bisa berkontribusi terhadap jumlah retribusi parkir yang tinggi ini. Selanjutnya Kabupaten Mempawah yang memiliki retribusi parkir kedua tertinggi sebesar Rp 536.094.000. Hal ini mungkin mencerminkan tingkat aktivitas dan populasi yang relatif tinggi di kabupaten ini. Di sisi lain, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sekadau memiliki retribusi parkir yang juga relatif rendah, masing-masing sebesar Rp21.600.000 dan Rp22.310.000. Hal ini dapat mencerminkan tingkat populasi atau aktivitas ekonomi yang lebih rendah, atau mungkin sistem penagihan yang kurang efisien dibandingkan dengan daerah lain.

Di sisi lain, Kabupaten Ketapang memiliki jumlah retribusi pelayanan parkir terendah dengan total Rp21.591.000. Hal ini mungkin mencerminkan bahwa Ketapang memiliki populasi dan aktivitas ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota atau kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi ini. Infrastruktur parkir yang lebih sedikit dan/atau sistem penagihan yang kurang efisien mungkin juga berkontribusi terhadap retribusi parkir yang lebih rendah di Kabupaten Ketapang.

Selain itu, tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Barat dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota melalui bagi hasil pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan beroperasi di daerah tersebut, penerimaan PKB dari pemerintah provinsi juga akan meningkat. PKB merupakan pajak provinsi yang dikenakan pada setiap kendaraan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Sebagian dari pendapatan PKB ini kemudian dibagikan kembali ke pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme bagi hasil yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 147 Tahun 2020 tentang bagi hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatnya penerimaan PKB sebagai hasil dari tingginya jumlah kendaraan bermotor berdampak positif pada PAD kabupaten/kota. Bagian dari pendapatan PKB yang menjadi bagi hasil akan menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. PKB merupakan pajak provinsi yang diterapkan pada kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah tersebut. Data ini mencerminkan pentingnya kontribusi kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut melalui PKB. Alokasi dana dari PKB ini

kemudian dibagi ulang kepada pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan mekanisme bagi hasil yang telah diatur. Misalnya, Kota Pontianak menerima alokasi terbesar sebesar Rp60.423.515.354, diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan alokasi sebesar Rp21.120.703.265. Seluruh alokasi dana yang diberikan kepada kabupaten dan kota dalam tabel ini mencapai total Rp 208.868.592.928 rupiah. Pendapatan ini kemudian berperan sebagai sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik di tingkat lokal, sambil memberikan dorongan bagi pembangunan berkelanjutan dalam wilayah tersebut.

Alokasi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diberikan kepada Kota Pontianak dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, populasi penduduk yang lebih besar di Kota Pontianak mungkin menjadi penyebab utama, karena semakin banyak penduduk, semakin tinggi permintaan akan kendaraan bermotor dan, akibatnya, penerimaan dari PKB. Selain itu, sebagai pusat ekonomi dan aktivitas perkotaan yang signifikan di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak mungkin memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menarik urbanisasi, dan mengakibatkan lonjakan mobilitas penduduk serta peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Faktor lain termasuk infrastruktur jalan yang baik dan aksesibilitas yang memadai di kota ini, mendorong lebih banyak penduduk untuk memiliki dan menggunakan kendaraan. Selain itu, jika Kota Pontianak adalah pusat perdagangan dan bisnis, maka aliran distribusi barang dan jasa yang padat juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan, akibatnya, penerimaan PKB yang tinggi. Faktor lainnya seperti pola mobilitas masyarakat dan kebijakan pemerintah setempat terkait dengan tarif pajak dan regulasi PKB juga mungkin turut berperan dalam menjelaskan mengapa Kota Pontianak mendapatkan alokasi terbesar dari PKB dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraeni et al. (2022) yang menemukan bahwa Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Utomo (2023) diperoleh hasil bahwa jumlah kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2012-2021.

4.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (TPT) umumnya tidak memiliki dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh

dari berbagai jenis pajak dan retribusi. Di sisi lain, TPT mencerminkan tingkat pengangguran di daerah tersebut, yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks PAD, perbedaan ini menggambarkan bahwa TPT dan PAD adalah dua hal yang berbeda secara konseptual. Misalnya, TPT tidak secara langsung memengaruhi jenis-jenis pajak yang menghasilkan PAD, seperti pajak properti, pajak penjualan, atau pajak restoran. Meskipun ada kemungkinan bahwa situasi ekonomi dan ketenagakerjaan yang buruk dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada PAD karena dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, hubungan antara TPT dan PAD adalah lebih kompleks dan tidak langsung. PAD dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi dan kebijakan, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat pajak, kesadaran wajib pajak, dan faktor-faktor lainnya yang beroperasi dalam konteks pajak dan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sementara TPT adalah indikator penting dalam analisis ketenagakerjaan, dampaknya terhadap PAD harus dipahami sebagai bagian dari gambaran ekonomi yang lebih luas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak memiliki dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali menjadi masalah yang kompleks ketika disandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Meskipun TPT mungkin tidak secara langsung memengaruhi PAD, tingkat pendidikan yang rendah dapat menciptakan tantangan serius dalam aspek ekonomi dan sosial. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menghasilkan tenaga kerja yang kurang terampil dan kurang siap untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang semakin kompleks. Ini bisa berdampak negatif pada daya saing daerah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan yang rendah juga dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan peluang pendidikan yang berujung pada siklus kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pendidikan sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya-upaya perbaikan dalam sistem pendidikan dan pemerataan aksesnya serta investasi dalam keterampilan dan pengetahuan masyarakat dapat membantu menciptakan hubungan positif antara pendidikan, pengangguran, dan PAD di masa depan.

Ketika jumlah tenaga kerja mayoritas dengan tingkat pendidikan rendah, ini berarti banyak pekerja memiliki keterampilan dan pengetahuan terbatas. Dapat dilihat dari Kabupaten Sambas, 56.66% dari populasi bekerja berusia 15 tahun ke atas memiliki tingkat pendidikan SD atau di bawahnya, 14.82% memiliki tingkat pendidikan SMP, dan 28.53% memiliki tingkat pendidikan SMA atau lebih tinggi. Persentase populasi bekerja dengan pendidikan setingkat SMA keatas lebih sedikit

dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Ini mungkin menunjukkan kurangnya akses ke pendidikan tinggi di wilayah ini, atau mungkin banyaknya pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang tinggi. Sebaliknya di Kota Pontianak, ada persentase individu bekerja yang jauh lebih tinggi dengan pendidikan setidaknya SMA (61.26%) dibandingkan dengan wilayah lain, menunjukkan tenaga kerja yang lebih berpendidikan di kota ini. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan atau jumlah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi lebih banyak.

Daerah dengan ketersediaan tenaga kerja yang lebih terdidik biasanya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih berkualitas dan berupah tinggi. Hal ini bisa meningkatkan pemasukan daerah melalui pajak penghasilan dan pajak perusahaan. Sebaliknya, daerah dengan sebagian besar tenaga kerja berpendidikan rendah mungkin terbatas pada pekerjaan yang kurang produktif dan berupah rendah, yang dapat mengurangi potensi pendapatan pajak daerah. Hal ini yang menyebabkan PAD Kota Pontianak lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2023) dengan hasil Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bungo. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Sihombing & Sihombing (2022) diperoleh hasil bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau.

5. KESIMPULAN

Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan pada giliran berikutnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, *ceteris paribus*, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Agar peningkatan wajib pajak ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan membuat surat panggilan terhadap wajib pajak apabila melewati batas waktu yang ditetapkan.

Jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor maka selain akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan retribusi, yakni retribusi parkir. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak



kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan iupaya-upaya yang memudahkan masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor, misalnya dengan pemberian subsidi pembelian kendaraan bermotor, atau melalui penyediaan pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor yang berbunga ringan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penertiban pengelolaan lahan parkir, agar terjadi kenaikan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan retribusi parkir.

Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. Hal ini mungkin disebabkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat mayoritas terdiri atas penduduk usia sekolah/kuliah sehingga memang mereka belum berpenghasilan. Sementara karena mereka belum berpenghasilan, sehingga kelompok ini belum menjadi wajib pajak, sehingga keberadaan kelompok inisial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Agar penduduk usia sekolah dan pendidikan tinggi ini kelak dapat menjadi pembayar pajak yang taat, maka pemerintah sebaiknya dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai sehingga penghasilan kelompok ini memungkinkan mereka untuk mampu membayar pajak atau dengan kata lain pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah mampu meningkatkan ability to pay kelompok ini di masa mendatang untuk membayar pajak sehingga terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

6. SARAN

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum memasukkan variabel ojek online yang sangat mungkin mempengaruhi pendapatan asli daerah. Keberadaan ojek online telah memudahkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sisi masyarakat yang menikmati fasilitas yang diberikan oleh ojek online ini bisa jadi akan menurunkan willingness untuk memiliki kendaraan bermotor, dan hal ini akan berpengaruh pada penurunan pendapatan asli daerah. Tetapi dari sisi pengemudi ojek online, perkembangan permintaan akan jasa ojek online akan mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana untuk menjadi pengemudi ojek online yang berikutnya akan meningkatkan wajib pajak kendaraan bermotor dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari fenomena ini, maka untuk penelitian berikutnya akan sangat menarik jika dilakukan dengan mempertimbangkan variabel jumlah ojek online sebagai salah satu determinan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian yang sama juga dapat dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda, yang bisa jadi akan memberikan temuan yang berbeda.

7. DAFTAR PUSTAKA

Adhi Prasetyo, A., & Aida, A. N. (2017). Pengaruh PAD,

DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 2(1), 51 – 61.

Anggraeni T, S., Vuspitasari, K, B., & Shanti Bhuana, I. (2022). Gorontalo Development Review Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Regional Economic Development Strategy. *Gorontalo Development Review (GOLDER)*, 5(1), 16 – 25.

Asmuruf, M. ., Rumate, V. A., A., V., & Kawung, G. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 727 – 737.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Kalimantan Barat dalam Angka*.

Chandra, P. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama Publisher.

Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Data*.

Doni, F. U. (2018). Analysis of Influencing Factors Regional Original Revenue (PAD) in The Provincial Government of Dki Jakarta. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.36406/ijbam.v1i1.220>

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157 – 172.

Harahap, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 51–63.

Hatta, M., & Riduan, A. (2017). Intention of Accounting Students to Careers as Accountants Abroad: Testing Theory Of Planned Behavior. *Journal of Accounting*, 5(1), 63–68.

Mawarni. (2013). The Effect of Local Own Revenue, and General Allocation Funds, on Capital Expenditure, and Its Impact on Regional Economic Growth (Studies in Districts and Cities in Aceh). *Journal of Accounting*, 2(2), 19–27.

Murib, D., Koleangan, R. A. M., & Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 12(1), 23–33.

Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *KLASSEN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 16 – 35.

Pangastuti, Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah. *EDAJ*, 4(2), 203 – 211.

Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kudhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

- Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *DEKAT: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37–56. <https://ejournal.uksw.edu/dekat>
- Rizal, Y., Iskandar, & Wati, D. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jse.v5i1.3445>
- Samudra, A. A., Koto, E. A., & Subagja, I. K. (2020). Performance Analysis of Local Tax Organization Using Tax Potential Measurement, Tax Gap and Compliance Cost: Study on Regional Tax and User Charges Agency Jakarta, Indonesia. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, 12(2), 2656 – 2654.
- Saraswati, E. ., & Utomo, Y. . (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah Wisatawan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode Tahun 2012-2021. *Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 192–200.
- Sihombing, S. ., & Sihombing, D. . (2022). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap PAD Provinsi Riau. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 195–202.
- Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, W., & Sugianto, C. (2019). The Structure of Regional Original Revenue and Its Effect on Economic Growth: Facts from Regencies and Cities in Central Jawa. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(1), 68–102. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i1.59>
- Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan (Pertama)*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Syahrial, & Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), 20–28.
- Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. PT. Rajawali.
- Widjaja. (1992). *Titik Berat Otonomi pada daerah Tingkat II*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulianto, E. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD di Kabupaten Bungo*. S1 Thesis.